

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA
ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA LANGSUNG DI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2017**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)

pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

FADHILA YUNiar RACHMAWATI

NIM. 12030115140191

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2019

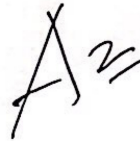
PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Fadhila Yuniar Rachmawati
Nomor Induk Mahasiswa : 12030115140191
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH DANA ALOKASI UMUM
(DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK),
DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TERHADAP BELANJA LANGSUNG DI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-
2017**

Dosen Pembimbing : Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Akt., CA.

Semarang, 28 Januari 2019

Dosen Pembimbing



Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Akt., CA.




NIP. 197412222000121001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Fadhila Yuniar Rachmawati
Nomor Induk Mahasiswa : 12030115140191
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH DANA ALOKASI UMUM
(DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK),
DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TERHADAP BELANJA LANGSUNG DI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-
2017**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 8 Maret 2019

Tim Penguji:

1. Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Akt., CA. (..........)
2. Dr. Indira Januarti, M.Si., Akt. (..........)
3. Andrian Budi Prasetyo, S.E., Akt., M.Si. (..........)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Fadhila Yuniar Rachmawati, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Langsung di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 28 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,

Fadhila Yuniar Rachmawati

NIM.12030115140191

ABSTRACT

Central Java Province has 35 regencies or cities, with abundant sources of income and natural wealth in each region. Therefore, a study was conducted which aims to identify and prove empirically the influence of the General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Funds (DAK), and Original Local Government Revenues (PAD) on Direct Expenditures in Districts / Cities in Central Java Province. The object of this study consisted of 35 districts / cities in Central Java Province and the data used was taken in 2013-2017.

The data used in this study are secondary data sourced from the District / City APBD Realization Report document in Central Java Province obtained from the Central Java Supreme Audit Agency (BPK). In this APBD Realization Report, data is obtained regarding the amount of realization of the General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Funds (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), and Direct Expenditure which consists of 3 components of expenditure, Employee Expenditures, Goods and Services Expenditures, and Capital Expenditures. The sampling method in this study by taking all the population which was then analyzed using multiple linear regression analysis and classical assumption test.

The results of this study indicate that the General Allocation Fund (DAU) and Regional Original Revenue (PAD) have a positive and significant effect, while the Special Allocation Fund (DAK) has a non-significant result of Direct Expenditure. The aim of this study is to find out which income can be extracted in order to increase public welfare and regions with direct expenditure.

Keywords: General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Direct Expenditures, Local Government.

ABSTRAK

Provinsi Jawa Tengah memiliki 35 kabupaten atau kota, dengan sumber-sumber pendapatan dan kekayaan alam yang melimpah di setiap daerahnya. Maka dari itu, dilakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris adanya pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Langsung pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Objek penelitian ini terdiri dari 35 daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan data yang digunakan diambil pada tahun 2013-2017.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang di dapat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah. Dalam Laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Langsung yang terdiri dari 3 komponen belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan mengambil seluruh populasi yang kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan uji asumsi klasik.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh positif dan signifikan, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai hasil yang tidak signifikan terhadap Belanja Langsung. Target penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan mana yang dapat digali potensi penerimaan pendapatan daerahnya agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerah dengan pengeluaran Belanja Langsung.

Kata kunci : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Langsung, Pemerintah Daerah.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Oh Allah, when i lose my hopes and plans, help me remember that Your love for me is greater than my disappointments and Your plans for me are better than my dreams.

(Ali r.a)

Everything is going to be ok, in the end if it's not ok, it's not the end.

(@thegoodquote)

Just keep moving forward and don't give a shit about what anybody thinks. Do what you have to do, for you.

(Johnny Depp)

Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh bekerja (urusan), dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya engkau berharap.

(Q.S. al -Insyirah 5-8)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ayah dan Ibuku tersayang&tercinta (Rosidi & Siti Cholifah) yang selalu memberikan motivasi dan dukungan serta perhatian yang tiada henti

Kedua kakakku yang selalu memberi semangat&motivasi

Sahabat dan teman – teman ku sayang

Keluarga besar Akuntansi 2015

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmatNya sehingga penelitian dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya campur tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan dan dukungan yang begitu besar dari :

1. Bapak Dr. Suharnomo, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Dr. Haryanto, S.E., M.si., Ak., CA. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
3. Bapak Dr. Agus Purwanto, SE, MSi, Akt, selaku dosen wali.
4. Semua dosen dan staff tata usaha yang telah membantu kelancaran penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
5. Orang tua tercinta, Bapak Rosidi dan Ibu Siti Cholifah serta kedua kakakku, Emalia dan Bana, terima kasih atas doa yang dipanjatkan, serta dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan kepada penulis.
6. Idaman dan Maung, Desi, Nisrina, Ayiq, Risa, Hasna, Nesya, Adita, Ace, Hafiz, Owe, Elle, Damar, Idham, Rezaldy, Fadhil, dan Ryan. Terima kasih untuk kebersamaan yang selalu menghibur, dukungan, semangat, arahan dan bimbingan selama kuliah.
7. Teman-teman keluarga besar Akuntansi Undip 2015. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan, pengalaman 3,5 tahun bersama satu angkatan ini yang membuat hari-hari selama perkuliahan

menyenangkan dan tidak membosankan karena adanya teman-teman keluarga Akuntansi Undip 2015.

8. Geng anti-anti sejak SMA, Shendy, Ristka, Dekpa, Achna, Nadilla, Ivanjeko, Hanif, Addyek, dan Pras. Terima kasih atas dukungan dan kebersamaan selama ini.
9. Sahabat-sahabatku, Lidya, Shendy, Nawang, Aul, Ristka, Oksa, Ancil, Anjani, Ziza, Fafa, Nabila, terima kasih sudah selalu setia mendengarkan keluh kesah penulis selama ini, semoga kalian semua selalu menjadi sahabat di saat suka maupun duka.
10. Mas Cakra, terima kasih atas segala perhatian dan omelan, waktu, dukungan, serta kasih sayang yang diberikan kepada penulis.
11. Desi, terima kasih telah memberikan arahan mengenai SPSS dan bantuan mengenai skripsi.
12. Seluruh kerabat, teman, pihak-pihak yang sudah membantu namun tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas bantuan dan doanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan sebagai input bagi penulis agar dapat menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, Februari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Disusun oleh:	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	10
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Teori Akuntabilitas.....	12
2.1.2 Otonomi Daerah	15
2.1.3 Anggaran Daerah	17
2.1.4 Belanja Daerah	18
2.1.5 Pendapatan Asli Daerah	24
2.1.6 Dana Perimbangan	27
2.2 Penelitian Terdahulu	30
2.3 Kerangka Pemikiran.....	36
2.4 Hipotesis Penelitian	38
2.4.1 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Langsung.	38
2.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Langsung	39
2.4.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Langsung	
40	
BAB III	42

METODE PENELITIAN.....	42
3.1 Variable Penelitian.....	42
3.1.2 Variable Independen	42
3.1.3 Variable Dependen.....	44
3.2 Populasi dan Sampel.....	45
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	45
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	46
3.5 Metode Analisis	46
3.5.1 Statistik Deskriptif.....	46
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	47
3.5.3 Uji Hipotesis.....	50
3.5.4 Analisis Regresi Berganda	52
BAB IV.....	53
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Hasil Penelitian.....	53
4.1.1 Deskriptif Objek Penelitian	53
4.1.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	58
4.1.3 Pengujian Hipotesis.....	62
4.1.3.1 Uji Statistik F.....	62
4.1.4 Interpretasi Hasil	65
Tabel 4.11.....	65
Ringkasan Hasil Uji Hipotesis	65
4.1.5 Pembahasan Penelitian	66
4.1.5.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Langsung	67
BAB V	70
KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
5.1 KESIMPULAN.....	70
5.2 KETERBATASAN.....	71
5.3 SARAN.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perhitungan Rasio Pertumbuhan di Kota Semarang.....	7
Tabel 1.2	Rasio Realisasi Belanja Langsung terhadap Belanja Daerah.....	8
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3.1	Pengambilan keputusan ada tidaknya Autokorelasi.....	50
Tabel 4.1	Objek Penelitian.....	54
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif.....	58
Tabel 4.3	Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov.....	59
Tabel 4.4	Hasil Uji Multikolinieritas.....	60
Tabel 4.5	Hasil Uji Glejser.....	60
Tabel 4.6	Hasil Uji Durbin Watson.....	61
Tabel 4.7	Hasil Run Test.....	62
Tabel 4.8	Hasil Uji Statistik F.....	63
Tabel 4.9	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	63
Tabel 4.10	Hasil Uji T.....	64
Tabel 4.11	Ringkasan Hasil Uji Hipotesis.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	38
------------	-------------------------	----

LAMPIRAN

LAMPIRAN A.....	75
LAMPIRAN B.....	76
LAMPIRAN C.....	81
LAMPIRAN D.....	82
LAMPIRAN E	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era reformasi sekarang ini, pembangunan daerah memang diperlukan dan penting adanya untuk dilakukan dan perlu ditingkatkan adanya pembangunan daerah. Dikarenakan adanya pembangunan daerah tersebut merupakan bagian yang terstruktur dari terwujudnya pembangunan nasional, sehingga pembangunan daerah pada era reformasi ini tidak dapat lepas dari adanya prinsip otonomi daerah. Pemerintah daerah harus melaksanakan pembangunan daerah secara adil dan berimbang. Dengan adanya UU Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 yang berisi mengenai Pemerintah Daerah dan UU Republik Indonesia No.33 Tahun 2004 yang berisi mengenai Perimbangan Keuangan Daerah, pelaksanaan otonomi daerah ini didukung dengan adanya kedua UU tersebut. Kedua UU pendukung pelaksanaan otonomi daerah ini merupakan pengganti dari UU Republik Indonesia No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah di Indonesia yang terakhir di bahas yaitu pada UU Republik Indonesia no.23 Tahun 2014 yang merupakan revisi atau pembaharuan dari beberapa pasal dari UU Republik Indonesia no.32 Tahun 2004. Kebijakan pemerintah yang mengatur tentang otonomi daerah merupakan prosedur yang dilihat secara umum dan memenuhi aspek penyerahan segala urusan dalam pemerintahan oleh Pemerintah Pusat

kepada daerah otonom yang sesungguhnya.

Dengan terselenggaranya otonomi daerah, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota memiliki hak kekuasaan dan cara tersendiri yang sesuai dengan aturan untuk menyelenggarakan dan mengembangkan program pembangunan untuk meningkatkan program penjaminan ekonomi rakyat yang diprogramkan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak memiliki kekuasaan untuk berinovasi mengembangkan program-program pembangunan tersebut. Tetapi, sekarang pemerintah daerah kabupaten dan kota dapat menunjukkan kemampuannya untuk mengembangkan program-program pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Untuk penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis asas desentralisasi, dilakukan pembiayaan atas beban APBD. Anggaran merupakan hal relevan dan penting dalam sektor pemerintahan daerah. Hal tersebut merupakan bentuk dari kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan fungsi pemerintah daerah kepada masyarakat untuk memberi pelayanan di daerahnya. Masyarakat mendesak untuk pelayanan di berbagai bidang perlu ditingkatkan oleh pemerintah. Terutama peningkatan pelayanan di bidang yang terjangkau oleh publik. Karena dengan adanya peningkatan pelayanan publik, pemerintah berharap mampu meningkatkan daya tarik bagi penanam modal untuk menanamkan modal dan dibukanya bisnis di daerah tersebut sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian daerah.

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah guna meningkatkan kemandirian dan kemampuan daerahnya dapat ditempuh dengan cara potensi penerimaan di

daerahnya perlu di optimalkan. Sumber penerimaan daerah terdiri dari berbagai dana yaitu Dana Perimbangan yang didalamnya berisi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, ada juga penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah serta Pinjaman Daerah. Menurut Halim (2009), tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah. Tuntutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengakibatkan alokasi anggaran belanja perlu diberikan yang lebih besar oleh pemerintah untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini sangat berkaitan dengan belanja langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan setiap tahunnya dan dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan jasa kepada masyarakat setempat seperti adanya pengadaan barang dan jasa dalam rangka perbaikan jalan, jembatan, irigasi dan lainnya, (Hidayah & Hari, 2014). Namun demikian, di Jawa Tengah masih belum merata akan adanya jasa yang diberikan oleh kabupaten atau kota mengenai minimnya fasilitas umum yang diberikan pemerintah. Kita masih menemukan beberapa daerah yang minim akan fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Fasilitas umum yang ada belum memenuhi tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan semua dana yang dipergunakan oleh pemerintah daerah diharapkan dapat digunakan dan dikelola secara efektif dan efisien menurut aturan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah dalam kebijakan penggunaan dana yang diberikan kepada daerah tersebut seharusnya dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Di dalam

perkembangannya selama ini, pemerintah memberikan dana perimbangan kepada daerah-daerah untuk mengatasi perbedaan ketimpangan fiskal antara daerah satu dengan yang lain dan adanya kebutuhan tiap daerah untuk pendanaan lainnya yang cukup besar. Ketimpangan fiskal yang dimaksud ini adalah suatu daerah yang tidak mampu untuk memenuhi pendanaan belanja dan biaya daerah yang dikeluarkan dengan menggunakan sumber pendanaan murni yang berasal dari daerah.

Dengan terselenggaranya otonomi daerah dimaksudkan untuk menuntut Pemerintah Daerah mengatur pemerintahannya secara mandiri, termasuk mandiri dalam masalah keuangan pemerintah. Meskipun begitu, pemerintah pusat tetap memberikan dana transfer yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk diwujudkan otonomi daerah. Dana bantuan tersebut merupakan dana yang ditransfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam pelaksanaan praktik pemerintahannya, transfer dana bantuan yang diberi oleh pemerintah pusat merupakan sumber pendanaan pemerintah daerah yang paling utama untuk membiayai dan melaksanakan operasional daerahnya. Pemerintah daerah sesuai aturannya melaporkan adanya dana bantuan tersebut dan diperhitungkan di perhitungan anggaran.

Sumber dana pengalokasian belanja modal dalam APBD adalah pendapatan asli daerah (PAD). PAD merupakan salah satu indikator pengukuran keberhasilan otonomi daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah. Semakin tingginya PAD suatu daerah diharapkan mampu meningkatkan investasi belanja langsung pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik yang diberikan semakin baik. Namun dalam realisasinya, peningkatan pendapatan asli daerah tidak selalu diikuti dengan kenaikan anggaran belanja langsung yang signifikan dikarenakan pemerintah daerah cenderung mengalokasikan lebih banyak pendapatannya untuk membiayai belanja operasional (Oktora & Pontoh, 2013).

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatannya, yang berakibat pada terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah. Upaya pemerintah pusat untuk mengatasi ketimpangan fiskal tersebut adalah dengan mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Menurut Maimunah (2006) tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah pusat berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 adalah dana alokasi umum (DAU). Pengalokasian DAU diserahkan dalam bentuk block grant, yaitu bantuan dana yang tidak disertai dengan syarat-syarat tertentu yang mengakibatkan dana tersebut mengalami pemborosan. Pada dasarnya DAU seharusnya dipergunakan untuk belanja modal guna pembangunan daerah, tetapi kenyataannya sebagian besar dana tersebut dipakai oleh pemerintah daerah untuk belanja pegawai yang merupakan komponen belanja langsung. Hal ini mengakibatkan pemerintah tidak dapat menggunakan dana tersebut untuk belanja

langsung yang bisa menggerakkan perekonomian.

Selain itu terdapat penerimaan dana lainnya dari pemerintah pusat, yaitu dana alokasi khusus dimana dana ini adalah dana untuk pemerintah daerah yang sumber penerimaannya berasal dari dana APBN yang merupakan dana untuk mendanai pelaksanaan kegiatan khusus untuk mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan daerah. Dana Alokasi Khusus ini bertujuan untuk membantu membiayai kegiatan yang bersifat khusus di daerah tertentu yang ada hubungannya dengan kepentingan nasional. Penggunaan dana ini secara khusus digunakan untuk membantu mendanai kebutuhan dan perlengkapan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat di daerah dimana perlengkapan tersebut belum dicapainya standar kelayakan. Dana ini hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan yang telah ditetapkan.

Tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur di semua pemerintah daerah di Indonesia adalah alokasi APBD untuk belanja modal yang telah diserap untuk pengeluaran rutin yang relatif kurang produktif. Pemerintah daerah cenderung mengalokasikan lebih banyak pendapatannya untuk kebutuhan operasional yang mengakibatkan tidak memadainya dana untuk membiayai belanja langsung. Alokasi sumber daya ke dalam anggaran belanja modal sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik berupa fasilitas umum dan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun kenyataannya, efektivitas dan efisiensi belanja ke daerah masih dinilai rendah karena pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal.

Pemilihan penelitian di Jawa Tengah mempunyai alasan tersendiri. Menurut Prayitno (2017), dapat dilihat selama 5 tahun belakangan ini khususnya di Kota Semarang mengalami pertumbuhan yang cukup pesat baik dari segi pelayanan, penataan kota, serta pembangunan. Pertumbuhan di Kota Semarang yang cukup pesat ini dapat ditunjukkan dengan data realisasi belanja langsung selama 5 tahun terakhir ini semakin meningkat. Kenaikan belanja tersebut berdasarkan perhitungan naik sebesar 9-22%. Kenaikan tersebut diikuti dengan kenaikan pendanaan yang diperoleh selama 5 tahun terakhir. Berikut adalah tabel kenaikan dana yang diperoleh dan pengeluaran belanja langsung selama 5 tahun terakhir di Kota Semarang :

Tabel 1.1 Perhitungan Rasio Pertumbuhan di Kota Semarang

NO.	Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
1	DAU	1,054,002,569,000	1,104,739,473,000	1,126,847,634,000	1,211,708,204,000	1,190,422,387,000
	pertumbuhan	-	0.05	0.02	0.08	-0.02
2	DAK	14,993,022,000	29,236,965,000	46,661,150,000	246,886,746,970	272,523,251,395
	pertumbuhan	-	0.95	0.60	4.29	0.10
3	PAD	925,919,310,506	1,138,367,228,493	1,201,581,778,459	1,491,645,900,065	1,791,886,378,674
	pertumbuhan	-	0.23	0.06	0.24	0.20
4	Belanja Langsung	2,427,164,122,074	2,834,515,640,795	3,162,490,870,881	3,887,702,864,665	4,267,356,234,098
	pertumbuhan	-	0.17	0.12	0.23	0.10

Sumber : data diolah

Selain itu terdapat data yang diperoleh bahwa realisasi belanja langsung terhadap belanja daerah di Jawa Tengah tergolong lebih sedikit dibanding DKI Jakarta dan Jawa Timur. Diperoleh hasil dari perhitungan bahwa selama 5 tahun terakhir ini, realisasi belanja langsung di Jawa Tengah hanya sebesar 0.262 terhadap belanja daerah, sedangkan di DKI Jakarta sebesar 0.526 dan Jawa Timur

sebesar 0.270. Berikut adalah tabel rasio realisasi belanja langsung terhadap belanja daerah di Provinsi yang ada di Pulau Jawa :

Tabel 1.2 Rasio Realisasi Belanja Langsung terhadap Belanja Daerah

No.	Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
1	DKI Jakarta	0.609	0.666	0.485	0.467	0.404	0.526
2	Jawa Barat	0.167	0.162	0.211	0.197	0.135	0.174
3	Jawa Tengah	0.247	0.263	0.288	0.274	0.238	0.262
4	DI Yogyakarta	0.326	0.382	0.407	0.169	0.396	0.336
5	Jawa Timur	0.276	0.268	0.301	0.281	0.223	0.270

Sumber : data diolah

Belanja Daerah digunakan untuk membiayai segala pelaksanaan urusan pemerintah yang sudah menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota dimana pelaksanaan urusan tersebut terdiri dari urusan yang bersifat wajib, urusan yang bersifat pilihan, dan urusan yang memiliki penanganan di sektor tertentu dan pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan antar pemerintah pusat dan daerah. Belanja urusan yang bersifat wajib ini dilaksanakan guna melindungi dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat untuk dipenuhinya kewajiban daerah dan diwujudkan dalam bentuk kesehatan, fasilitas umum dan sosial, serta pendidikan yang dapat dipergunakan serta perkembangan system jaminan sosial. Untuk memudahkan penganggaran biaya di suatu program, terdapat dua macam belanja yang dibagi menurut kelompok belanjanya, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Penelitian ini melihat seberapa besar kontribusi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung di Provinsi Jawa Tengah yang belum dapat memberikan pemerataan kebutuhan, fasilitas, dan pelayanan untuk masyarakat di daerah

kabupaten/kota di provinsi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti akan melaksanakan suatu penelitian dengan judul **“Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Langsung di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya penjelasan latar belakang di atas, peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang ada. Adapun permasalahan yang akan dibahas antara lain :

1. Apakah DAU berpengaruh terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah DAK berpengaruh terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah PAD berpengaruh terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dengan adanya hubungan identifikasi problematika yang ada, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk pembuktian secara empiris apakah terdapat pengaruh DAU, DAK dan PAD terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian lainnya

untuk mengetahui seberapa besar kinerja Pemerintah Daerah untuk menggali potensi sumber pendapatan daerah untuk kesejahteraan umum dari Belanja Langsung.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan yang dapat diharapkan oleh pihak internal maupun eksternal pemerintahan, antara lain :

1. Diharapkan dapat memberi masukan dan saran kepada Pemerintah Daerah mengenai faktor pendapatan mana yang perlu dikembangkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi akademis dalam dikembangkannya ilmu yang berhubungan dengan bidang Akuntansi Pemerintahan.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi penelitian yang lain.
4. Diharapkan penelitian ini dapat menyempurnakan penelitian lainnya yang sejenis.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penilitan ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang tersusun sebagai berikut :

1. BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah, sehingga timbul perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan

yang digunakan.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti, hasil penelitian terdahulu yang sejenis, kerangka pemikiran, serta hipotesis.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis.

4. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian, uraian tentang obyek penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

5. BAB V : PENUTUP

Menguraikan kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya dan berisi saran untuk pihak yang terkait.